



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARATUNI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 179140

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.130.000.000
2. Tanah Seluas 1740 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/405 m2 di KAB / KOTA BARITO SELATAN, WARISAN Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/108 m2 di KAB / KOTA BARITO SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 263.700.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, FORD RANGER SINGLE CAB BASE 2.5 L (4X4) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 173.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 105.911.398

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.349.611.398

III. HUTANG Rp. 57.727.656

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.291.883.742



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.